

**REKONSTRUKSI MASKULINITAS:
MENGUAK PERAN LAKI-LAKI DALAM PERJUANGAN
KESETARAAN GENDER**

Gusri Wandu

Alumni Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang

Email: 9.4ndie@gmail.com

Abstract

Gender inequality is a phenomenon that is still sticking to the present. To overcome the various programs have been implemented for the sake of equality. But it is still fixed in women, while men who also had a big hand in the creation of these gaps are rarely involved. How important is the role of men in gender equality and how to realize them? This question will be discussed in this paper.

Keywords: *gender, roles, patriarchy, masculinity*

A. Pendahuluan

Gender merupakan salah satu isu yang mencuat beberapa dekade belakangan ini seiring maraknya tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Jika ditelusuri lebih dalam kekerasan dan pelecehan tersebut tidak hanya terjadi pada ranah aktual, namun juga pada ranah simbolik. Di mana sisi keperempuanan selalu dieksploitasi untuk berbagai kepentingan. Hal ini bisa diperhatikan dalam berita di media massa, perfileman, iklan dan sebagainya (Sobary, 1998). Keadaan ini tak ayal membangkitkan kepedulian sekelompok orang untuk memperjuangkan hak perempuan. Mereka yang kerap disebut sebagai feminis ini, secara perlahan melakukan berbagai tindakan, mulai dari aksi turun ke jalan sampai pergulatan argumentasi di parlemen.

Dalam diskursus feminisme, laki-laki dengan budaya patriarkisnya merupakan sebuah momok. Karena budaya yang telah

terinternalisasi dalam berbagai elemen ini memberikan posisi yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan. Relasi yang tercipta antara laki-laki dan perempuan terlihat seperti penguasa dan abdi. Dalam istilah jawa dikenal dengan *konco wingking* (teman di belakang), dimana perempuan berada dalam subordinasi.

Karena begitu kuatnya sistem ini, ia tidak hanya mendominasi pada budaya yang menganut sistem patrilineal, tetapi juga merambah budaya matrilineal. Seperti yang terungkap dalam penelitian *Woman Research Institute*, ternyata di Minangkabau sebagai salah satu etnis penganut matrilineal, meski kaum perempuan mempunyai kedudukan, namun hal itu tidak lebih hanya sebagai simbol, karena bagaimanapun keputusan terakhir berada pada tangan *mamak* (paman), yang sejatinya adalah laki-laki (wri.or.id, 2006).

Kekuasaan patriarkis yang diterima laki-laki dari masyarakat telah dilanggengkan oleh berbagai elemen kebudayaan. Adat, norma, dan ajaran agama sebagai sumber nilai merupakan elemen terpenting dalam pewarisan itu. Diantara beberapa elemen tersebut, agama-lah yang dianggap sebagai penyumbang terbesar dalam menciptakan kesenjangan tersebut. Karena agama merupakan sumber nilai utama dan determinan terhadap kebudayaan yang lain. Maka dengan “menggugat” ajaran patriarkis yang bias gender dalam agama, diharapkan dapat menggoyah sendi yang menyokong keamanan laki-laki selama ini.

Selama ini, para penggiat gender cenderung melihat fenomena ini sebagai masalah perempuan, sehingga solusi yang diberikan lebih ditekankan kepada pribadi perempuan itu sendiri. Namun, disadari atau tidak, sesungguhnya permasalahan mendasar adalah masalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Maka, dengan hanya memberi penekanan di salah satu pihak saja tentu tidak akan memberikan hasil yang efektif dalam terciptanya kesetaraan sebagaimana yang diharapkan selama ini.

Laki-laki yang selama ini bertindak sebagai penyumbang ketidaksetaraan tersebut seharusnya juga dilibatkan dalam wacana ini.

Tidak hanya perempuan yang harus menyadari dan menyuarakan kesetaraan, namun laki-laki sendiri harus menyadari bahwa perempuan setara dengan dirinya. Lantas, seberapa pentingkah peran laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender?. Lalu mungkinkah hal tersebut dapat dilakukan dibalik kokohnya budaya patriarkis yang dikungkung berbagai nilai yang telah tertanam kokoh dalam masyarakat?. Jika ia, lantas apa usaha yang dapat dilakukan?. Secara umum inilah beberapa masalah yang akan dikupas dalam tulisan ini.

B. Memahami Gender

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 untuk memisahkan pencirian manusia yang bersifat sosial-budaya dengan pencirian yang bersifat biologis. Pemahaman mengenai istilah “sex” dan “gender” perlu didudukkan sebelum membahas masalah ini lebih dalam. Kedua istilah tersebut secara literal cenderung diartikan sama yaitu merujuk pada jenis kelamin. Namun, *sex* lebih mengarah pada pembagian fisiologis dan anatomis manusia secara biologis. Alat kelamin tersebut merupakan atribut yang melekat pada manusia secara alamiah (*nature*) yang secara fungsional tidak dapat dipertukarkan. Meskipun kecanggihan teknologi bisa membuat seseorang untuk berganti kelamin, namun fungsi biologis utama tetap tidak bisa dipenuhi (Setiadi & Kolip, 2011).

Gender menunjukkan perbedaan jenis kelamin berdasarkan peran dan status dalam kehidupan sosial budaya. *Sex* terbentuk secara alamiah dan tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender terbentuk dari proses sosial dimana kondisinya bisa berbeda diberbagai tempat. Perbedaan tersebut sangat diperlukan karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam kajian analisis gender.

Emawati (2010) menyebutkan bahwa terjadi kerancuan pemahaman tersebut di tengah masyarakat disebabkan oleh empat hal. *Pertama*, karena kedua istilah berasal dari bahasa asing yang secara literal artinya hampir sama. *Kedua*, karena permasalahan gender dianggap hanya terjadi dalam beberapa lingkup kehidupan, padahal hal tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, kurangnya

sensitivitas baik laki-laki atau perempuan terhadap permasalahan tersebut. *Keempat*, perempuan merasa kurang mampu menyuarakan ketidakadilan yang mereka terima.

Gender secara literal berasal dari bahasa latin yang berarti jenis kelamin. Pemahamannya, gender diidentifikasi melalui perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat, yang menyangkut masalah sosial, budaya, psikologis dan aspek non biologis lainnya. Dimana perbedaan tersebut nanti akan menimbulkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan (Umar, 1999). Persoalan gender berkelindan dengan budaya, sehingga permasalahannya tidak sama di semua tempat. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana interpretasi terhadap gender selanjutnya.

Menurut Ferree yang dikutip oleh Puspitawati (2013) dalam Lylod (2009) gender merupakan “properti individual, namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dengan perempuan secara individual sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah kelas dan ras”.

Dalam tulisan yang sama, West & Zimmerwan (1987) mengemukakan bahwa gender bukan sebagai kata benda “menjadi seseorang” namun suatu perlakuan. Gender diciptakan dan diperkuat melalui diskusi dan perilaku, dimana individu menyatakan suatu identitas gender dan mengumumkan pada yang lainnya” (Puspitawati, 2013). Dari pengertian ini terlihat bahwa dalam penetapan peran yang mesti dilakoni oleh masing-masing pihak terdapat tawar menawar. Hasil tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi sesuatu yang tertanam dalam masyarakat sebagai suatu kemestian.

Gender juga diartikan sebagai konsep budaya mengacu kepada suatu konstruksi sosial yang melalui proses internalisasi dan sosialisasi menerapkan adat kebiasaan, norma-norma, sanksi, ciri-ciri dan perilaku bagi pria dan wanita serta menentukan apa yang pantas dimiliki dan diharapkan dari laki-laki dan perempuan. Gender

bergerak dalam lingkup kultur (budaya) dan struktur peraturan dan sanksi-sanksi yang berlaku bagi masyarakat tertentu dan dapat berubah menurut tempat dan waktu (Departemen Agama, 2011).

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa gender sejatinya adalah bagaimana suatu budaya menginterpretasikan perbedaan kelamin, yang berkaitan dengan atribut, perilaku, kebiasaan, harapan, peran dan fungsi yang diletakkan pada masing-masingnya. Dimana interpretasi tersebut berbeda antara suatu kebudayaan, dan dapat berubah seiring berjalannya waktu.

C. Dominasi Patriarkis dan Ketertindasan Perempuan

Sistem patriarki merupakan momok dalam kajian gender, karena sistem ini dianggap melanggengkan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Patriarkis secara bahasa berasal dari kata “patriark” yang berarti kekuasaan bapak, yang ditujukan untuk pelabelan keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki. Secara terminologi diartikan untuk menunjukkan pemahaman kekuasaan laki-laki, hubungan kekuasaan dengan apa laki-laki menguasai perempuan, serta sistem yang membuat perempuan dikuasai dengan bermacam-macam cara (Zuhrah, 2012). Ideologi patriarki merupakan salah satu bentuk dari ideologi hegemoni, yaitu ideologi yang membenarkan penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, baik berdasarkan jenis kelamin, agama, ras dan kelas ekonomi. Menurut Pyke, seperti yang dikutip Darwin & Tukiran (2001) dalam ideologi ini terdapat 3 hal pokok yang mendasarinya, yaitu:

- a. Kesepakatan sosial yang menguntungkan kelompok dominan cenderung dianggap mewakili kepentingan semua orang;
- b. Ideologi ini cenderung diterima apa adanya sebagai sebuah kemestian;
- c. Dengan mengabaikan kontradiksi yang sangat nyata antara kepentingan kelompok yang dominan dengan kelompok subordinat, ideologi seperti ini dianggap sebagai penjamin kohesi dan kerjasama sosial, sebab jika tidak demikian yang terjadi justru suatu konflik.

Dalam sejarahnya, sistem patriarkis sudah muncul sejak manusia mengenal hak milik pribadi. Harta yang ada mesti diwariskan, maka kejelasan nasab seseorang sangat diperlukan. Saat inilah kaum perempuan dilarang berhubungan secara “bebas”. Selain itu, dengan posisinya sebagai pencari nafkah, otomatis laki-laki mempunyai akses yang lebih luas dibandingkan kaum perempuan. Dimana hal ini akan memberikan pengaruh terhadap dominasi laki-laki kepada perempuan dikemudian hari (Valentina & Putra, 2007).

Dalam sistem patriarkis, kaum wanita seakan-akan tidak mendapatkan tempat. Mereka hanya menjadi makhluk nomor dua, sebagai abdi, dan selalu termarginalkan. Dalam berbagai elemen kehidupan, perempuan hanya menjadi objek dan laki-lakilah sebagai subjeknya. Perempuan tidak dilihat dari sisi keperempuanannya, namun direduksi dari kekurangan mereka dari laki-laki. Posisi laki-laki menjadi standar untuk mendefinisikan dan menentukan kodrat perempuan (Adji, dkk, 2009).

Menurut Gadis Arivia, yang dikutip Adji dkk. (2009), relasi yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan dipicu oleh paham dikotomik, dimana dalam paham tersebut selalu menggambarkan dua hal yang bertentangan. Ada siang/malam, pagi/sore, terang/kelam, baik/buruk, laki/perempuan. Dalam pemahaman tersebut, segala yang baik selalu diasosiasikan dengan laki-laki, dan sebaliknya bagi perempuan.

Hal ini tidak hanya sekedar perdebatan teoritis yang bergolak dalam pemahaman belaka. Pemahaman tersebut memberikan pengaruh yang sangat kentara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pemahaman seperti ini, secara tidak langsung menjadikan perempuan inferior, meski tidak diungkapkan dengan jelas. Dalam bidang pendidikan contohnya, pemahaman patriarkis yang menyatakan tugas perempuan hanya bagian sumur, dapur dan kasur, menjadikan perempuan enggan untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Parahnya paham ini juga terus dilestarikan dalam pemahaman perempuan itu sendiri.

Paham patriarkis telah memberikan dampak negatif yang nyata dalam kehidupan perempuan, sebagaimana yang dikutip oleh Setiadi & Kolip dalam Fakih (2011) bahwa setidaknya terdapat lima permasalahan yang muncul akibat senjangnya dalam relasi tersebut. *Pertama*, berkaitan dengan *marginalisasi* perempuan. Dalam hal ini terjadi pemiskinan terhadap perempuan melalui berbagai kebijakan, tafsir agama, tradisi ataupun kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah kebijakan revolusi hijau yang diberlakukan pemerintah, sehingga banyak kaum perempuan pedesaan yang tersingkir dari struktur sosial karena kehilangan lahan pekerjaan mereka.

Kedua, adanya *subordinasi* terhadap perempuan. Dalam hal ini perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis dalam masyarakat. Seperti menganggap perempuan sebagai makhluk yang emosional sehingga tidak diperhitungkan dalam mengambil keputusan. Keadaan ini berbeda di setiap daerah, tergantung dengan budaya setempat. Pada masyarakat Jawa misalnya, pada masa dahulu terdapat anggapan bahwa peran perempuan hanya di rumah mengurus keluarga. Hal ini berimbas terhadap rendahnya pendidikan, karena hal tersebut dianggap sia-sia. *Toh*, akhirnya hanya berkutat pada urusan sumur, dapur dan kasur. Kondisi ini sangat jauh berbeda dibandingkan laki-laki, mereka sangat diprioritaskan.

Ketiga, adanya pelabelan (*stereotype*) terhadap perempuan. Pelabelan cenderung kepada hal-hal negatif yang ditujukan pada pihak yang dianggap lemah. Asusila, centil, dan emosional adalah beberapa label yang dilekatkan pada perempuan. Ketika ada perempuan yang berpakaian minim, label centil langsung ditujukan padanya, meski ia tidak melakukan apa-apa. Jika terjadi tindak pelecehan, maka kesalahan berada pada diri perempuan, karena dianggap telah "menarik" perhatian laki-laki dengan pakaian minimnya. Begitupun terhadap pekerja seks, sebutan sebagai wanita asusila, pelacur, perek dan sebagainya secara otomatis disandangkan padanya. Pelabelan tersebut tidak berlaku pada laki-laki yang bekerja sebagai *gigolo*,

sampai saat ini istilah laki-laki tuna susila masih terdengar janggal di telinga.

Pelabelan ini juga sampai dalam lingkup rumah tangga. Suami akan selalu dinobatkan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah meski terkadang ia tidak bekerja. Bagaimanapun tingginya penghasilan istri, bahkan ketika melebihi penghasilan suami, tetap saja penghasilannya dianggap sebagai tambahan saja.

Keempat, terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan. Di dunia ini seakan tidak ada lagi tempat yang nyaman bagi perempuan yang mampu menjamin keselamatannya. Jangankan di tempat sepi, di tengah keramaianpun mereka tidak luput dari berbagai tindakan yang tidak menyenangkan. Pelecehan seksual, pemerkosaan, KDRT, pemaksaan sterilisasi (KB) merupakan kejahatan umum yang terjadi terhadap perempuan. Perempuan bahkan dianggap sebagai komoditi yang layak diperjualbelikan (*human trafficking*).

Terakhir adalah masalah beban kerja bagi perempuan. Perempuan selama ini masih kesulitan dalam mencari pekerjaan. Sifat emosional yang dilekatkan kepada perempuan menjadikan posisi pengambil kebijakan hanya sebagai angan-angan, walaupun ada yang menempati, itu tidak seberapa. Perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang tidak banyak membutuhkan skill. Dalam hal gaji, masih ada diantara perempuan yang menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Perempuan yang telah menikah, dihadapkan pada beban kerja ganda, karena peran sosial sebagai pengurus rumah tangga yang dilekatkan selama ini tidak dapat mereka tanggalkan.

Dalam ranah ilmu pengetahuan perempuan juga masih belum bisa mendapatkan posisi yang layak. Baik dalam hal keterlibatan mereka terhadap ilmu pengetahuan ataupun bagaimana ilmu pengetahuan dalam mempersepsikan mereka, seperti yang diungkapkan oleh Sadli (2010) dalam perkembangan awal Filsafat sebagai sumber ilmu pengetahuan, perempuan diartikan sebagai

mahluk yang tidak sempurna, karena dianggap tidak rasional. Dasar-dasar pemikiran seperti itulah yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang androsentris.

Androsentrisme mengarahkan ilmu pengetahuan berkembang kepada apa yang dianggap penting oleh laki-laki berupa pemilihan topik dan pengembangan teori. Dengan kata lain, pembahasan mengenai perempuan menjadi suatu hal yang dikesampingkan. Selain itu, perempuan kehilangan hak-haknya hanya karena mereka berjenis kelamin perempuan (Sadli, 2010).

Sejalan dengan ilmu pengetahuan, dalam penguasaan teknologipun perempuan masih jauh tertinggal. Teknologi seakan menjadi domain maskulin, sehingga memunculkan stereotip bahwa laki-lakilah yang dianggap cocok dan kompeten dalam menguasainya. Perempuan hanya ambil bagian dalam penggunaan saja, dan itupun tidak banyak.

Stereotip tersebut memberikan imbas terhadap rasa percaya diri perempuan dalam bekerja dan memilih pekerjaan dalam bidang teknologi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebutkan bahwa meski perempuan mempunyai nilai akademik yang bagus, namun itu tidak memberikan pengaruh positif terhadap pekerjaan dalam bidang IPTEK yang disebabkan rasa kurang percaya diri. Adanya konstruk sosial bahkan lebih mengharapkan laki-laki yang berkiprah dalam hal tersebut (bbc.com, 2015).

Dominasi patriarkis masih terus berlanjut pada ranah agama. Sebagai salah satu elemen kebudayaan, agama merupakan unsur yang determinan terhadap elemen yang lain. Karl Marx menyebutkan bahwa agama merupakan candu, dimana manusia menjadikannya sebagai tempat pengaduan terakhir. Namun, sayangnya agama juga meninabobokkan perempuan dalam ketertindasan melalui ajaran atau tafsir dari ajaran tersebut yang cenderung bias gender dan misoginis.

Dari agama primitif hingga agama pada masa modern saat sekarang ini termasuk Islam banyak dinilai mendiskreditkan

perempuan melalui doktrin-doktrinya. Hindu hingga abad 17 masih menghendaki agar para istri ikut mencampakkan diri dalam api pembakaran jenazah suaminya. Dalam ajaran Yahudi, perempuan hanya berkedudukan sebagai *khadim* atau pembantu (Yafie, 2000). Sumbullah (2006) juga membenarkan hal tersebut, sebagaimana yang ia kutip dari Sharma (2002), hampir dalam setiap agama terdapat ajaran yang mendiskreditkan perempuan. Dalam agama Hindu anak laki-laki lebih dihargai dari pada anak perempuan. Meski Hindu memberikan penghargaan yang besar terhadap sosok ibu, namun pada masa abad pertama SM, sebagai perempuan secara umum, nasibnya tidak ubahnya seperti Kasta Sudra.

Kristen sebagai agama patriarkal juga memberikan posisi yang lebih terhadap laki-laki, maka usaha untuk menyamakan keduanya merupakan bentuk pertentangan terhadap ajaran Kristus. Islam sebagai agama wahyu terakhir juga dianggap memiliki ajaran yang bias gender. Hal tersebut terdapat dalam beberapa ayat terkait dengan penciptaan adam dan hawa, pembagian warisan, kepemimpinan, persaksian, dan beberapa tema lain. Ayat-ayat tersebut terus mengalami diskursus antara kelompok tekstualis dan kelompok kontemporer hingga saat sekarang (Sumbullah, 2006).

Dari paparan di atas terlihat bagaimana hegemoni patriarkis telah mengungkung kehidupan perempuan dalam berbagai bidang. Elemen budaya, agama dan nilai-nilai lokal telah melanggengkan hal tersebut, sehingga, hanya dengan “memaksa” perempuan untuk keluar dari zona patriarkis yang telah mapan selama ini merupakan tindakan yang tidak efektif dalam meningkatkan kesetaraan gender. Dengan demikian peran laki-laki sangat dibutuhkan dalam menciptakan kesetaraan yang didambakan selama ini.

D. Maskulinitas dalam Ranah Patriarki: Sebuah Paradigma Baru

Maskulinitas merupakan sebuah konstruk kelaki-lakian terhadap laki-laki. Dimana *se-abrek* nilai disandangkan didalamnya sebagai patokan untuk bisa menjadi seorang laki-laki “ideal”. Maskulinitas bukanlah bawaan dari lahir namun dibentuk dari konstruk sosial.

Menurut Barker, sebagaimana yang dikutip oleh Demartoto (2012) secara umum nilai-nilai yang diutamakan dalam maskulinitas adalah kekuatan, kekuasaan, aksi, kendali, kemandirian, kepuasan diri, dan kerja. Sebaliknya, hal yang dipandang rendah adalah masalah hubungan interpersonal, kemampuan verbal, kehidupan domestik, kelembutan, komunikasi, perempuan dan anak-anak. Dimana hal-hal tersebut dinilai sebagai sifat feminin.

Sebagai konstruk sosial, maskulinitas sangat dipengaruhi oleh budaya, sehingga nilai-nilai ke-maskulin-an bisa berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut terasa sangat kental sekali, bahkan telah ditanamkan ketika seorang anak laki-laki baru lahir. Berbagai aturan dan atribut budaya telah diterima melalui berbagai media berupa ritual adat, ajaran agama, pola asuh, jenis permainan, jenis tayangan televisi, buku bacaan dan filosofi hidup (Demartoto, 2012).

Dalam perjalanan hidupnya laki-laki harus mengikuti alur “kelaki-lakian” sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki. Seperti yang diungkapkan oleh Alimi (2004), bahwa orientasi kehidupan laki-laki dan perempuan dikotak-kotakkan kedalam maskulin dan feminin. Jika laki-laki maka harus maskulin dan jika perempuan maka harus feminin. Nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi terpatron dalam maskulinitas menjadikan laki-laki harus mengarahkan dirinya agar sesuai dengan apa yang telah “digariskan” tersebut. Laki-laki tidak boleh cengeng, menangis, gemulai, dan berbagai ciri yang menggambarkan sifat “kewanitaan” merupakan aturan tidak tertulis yang harus dipatuhinya.

Dunia patriarkis yang memberikan posisi lebih kepada laki-laki namun, dibalik itu semua juga terdapat beban berat yang harus dipikul. Laki-laki dituntut mencapai derajat kelaki-lakian sebagaimana yang telah terpatri dalam ranah sosial selama ini. Tidak jarang diantara mereka yang gagal, sehingga menjadi tekanan yang berujung kepada hal-hal yang negatif. Banyak diantara mereka (laki-laki) yang terlibat adu otot baik secara individu ataupun kelompok ketika menemui jalan buntu dari sebuah permasalahan. Keganasan tersebut tidak hanya

ditujukan kepada laki-laki saja, namun juga tidak jarang terhadap perempuan, berupa pelecehan, kekerasan dan tindak kriminal lainnya.

Tindakan-tindakan tersebut lama kelamaan telah menjadi *image* bagi laki-laki, sehingga hal tersebut tidak menjadi suatu yang aneh dan mendapatkan perhatian yang serius dalam masyarakat. Suatu hal yang lumrah ketika mendengar orang tua (umumnya ayah) yang menanggapi anaknya berkelahi, “Ah... dia itu kan laki-laki”. Seakan-akan tidak disebut laki-laki jika tidak pernah berkelahi dalam hidupnya. Stereotip seperti inilah yang nanti menimbulkan hubungan yang bias antara laki-laki dan perempuan, dimana hegemoni laki-laki terhadap perempuan dianggap sebagai suatu yang kodrati. Berbagai tuntutan tersebut menjadikan laki-laki enggan membicarakan dirinya, terutama masalah perasaan. Padahal ruang-ruang dialog bagi mereka untuk mengkritisi konsep kelelakiannya sangat diperlukan, termasuk membuka ruang untuk mendialogkan kecemasan-kecemasan terhadap konsep yang dianggap membebani (Demartoto, 2012).

Sesungguhnya konsep maskulinitas bukanlah hal yang bersifat baku, namun juga bisa mengalami perubahan. Sebagaimana yang dikutip Demartoto (2012) dari Beynon dalam Natsir (2007), bahwa konsep maskulinitas terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini Beynon membagi perkembangan tersebut dalam empat dekade, yaitu: pra 80-an; dekade 80-an; dekade 90-an; dan dekade 2000-an.

Pada dekade pra 80-an wujud maskulinitas berada pada laki-laki kelas pekerja dengan bentuk tubuh dan perilaku yang dominator, terutama terhadap perempuan pada masa ini terdapat penguatan nilai bahwa laki-laki harus menghindari perilaku yang bersifat feminin; laki-laki mesti mempunyai status yang tinggi; laki-laki harus rasional dan tidak menunjukkan emosi; terakhir, laki-laki harus agresif dan berani menghadapi resiko. Pada dekade 80-an, maskulinitas terdapat dalam sosok “*new man*” dimana sifat ke-feminim-an dimunculkan dalam diri laki-laki. Bukan suatu hal yang aneh lagi ketika mereka terlibat dalam pengasuhan anak dan urusan domestik lainnya. Selain

itu gaya hidup laki-laki mengarah pada gaya hidup flamboyan dan perlente. Dimana kemewahan merupakan sebuah kemestian.

Maskulinitas di era 90-an kembali menghidupkan tradisi-tradisi pada era 80-an. Di mana macho, kekerasan dan *holiganism* merupakan ciri utamanya. Hubungan laki-laki dan perempuan hanya sebatas kesenangan semata. Kebebasan menjauhkan dari hubungan yang bersifat domestik yang membutuhkan loyalitas dan dedikasi. Pada masa 2000-an maskulinitas mengarah kepada kehidupan laki-laki metroseksual, yang begitu memperhatikan penampilan, detail dan perfeksionis.

Jika diperhatikan, tidak banyak sebenarnya perubahan yang terjadi dalam konsep maskulinitas, namun hal itu bukanlah masalah penting dalam hal ini. Karena yang ingin dilihat adalah konsep tersebut sebenarnya fleksibel, tinggal bagaimana mengarahkannya, agar maskulinitas tidak lagi menampilkan keganasan, namun lebih mengarah kepada hal-hal yang positif. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Subono (Kompas.com, 2010) "Lelaki ideal bukan final. Lelaki dikondisikan sesuai dengan nilai-nilai yang dikonstruksikan secara sosial seperti harus *six pack* dan lainnya. Citra yang dibuat secara sosial untuk lelaki ini bisa diubah". Lebih lanjut dalam tulisan tersebut dikatakan, bahwa ketidakmampuan laki-laki memenuhi citra ideal tersebut menjadikan mereka malu dan tidak percaya diri. Maka untuk menutupi kegagalan tersebut, mereka menggunakan kekuatan dalam dirinya untuk melakukan kekerasan, dan targetnya adalah perempuan.

Dalam konteks gender hal tersebut sangat berperan sekali dalam menciptakan kesetaraan, karena "kesenjangan" yang terjadi selama ini sangat dipengaruhi oleh "tuntutan" maskulinitas laki-laki. Maka dengan memberikan arah baru dalam pemahaman maskulinitas diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesetaraan gender. Hal tersebut dapat direalisasikan melalui beberapa hal: *Pertama*, kebijakan pemerintah yang responsif gender. Selama ini kebijakan pemerintah masih cenderung bias gender, banyak kebijakan yang lahir tanpa memperhitungkan aspek laki-laki dan perempuan di dalamnya. Salah satu contohnya adalah kebijakan revolusi hijau,

dimana kebijakan tersebut telah memarginalkan perempuan dari segi akses ekonomi. Dalam bidang gender itu sendiri, kebijakan pemerintah selama ini masih tertuju pada peningkatan kualitas diri perempuan, namun masih sangat minim kebijakan untuk mendorong laki-laki agar ikut berpartisipasi dalam hal tersebut.

Kedua, pemamfaatan media. Media merupakan properti yang sangat ampuh dalam membentuk opini publik. Berbagai penelitian gender terkait dengan media selama ini mengungkap bahwa dalam media masih banyak terjadi bias gender. Hampir semua iklan rokok menampilkan hal ini, sinetron, film bahkan video klip lagupun tidak bisa melepaskan diri dari belenggu bias gender. Dalam dunia tulisan berupa puisi, novel, komik dan sebagainya juga kerap menampilkan peran yang berat sebelah dalam relasi gender. Bahkan hal itu tidak bisa dihindari walau dari kalangan sastrawan wanita sekalipun (Sobary, 1998). Permasalahan sekarang tinggal bagaimana bisa mengarahkan media agar bisa memberikan sudut pandang yang berbeda dari apa yang biasa dipahami oleh khalayak banyak. Khalayak bisa menghadirkan persepsi yang baru mengenai maskulinitas, yang diharapkan mampu merubah pola pikir laki-laki.

Ketiga, membentuk kelompok atau organisasi laki-laki progender. Pembentukan kelompok ini diharapkan dapat menjaring laki-laki lain yang belum tersentuh dengan wacana ini. Selain itu, laki-laki juga bisa men-*share* pengalaman mereka, baik berupa kendala ataupun hal-hal positif baru yang mereka peroleh dari apa yang telah mereka praktekan.

Keempat adalah melalui tafsir agama yang lebih moderat. Masyarakat Indonesia meskipun bukan sebagai negara agama, namun masih menjadikan agama sebagai landasan pemikiran mereka. Menampilkan pemahaman yang lebih moderat mengenai relasi laki-laki dan perempuan dapat merubah persepsi dan prilaku laki-laki sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang egalitarian. Sekali lagi perlu adanya kesamaan sikap guna mewujudkan kehidupan yang egaliter antara laki-laki dan perempuan. Semua lini kehidupan mesti

bersinergi, menyatukan pemikiran dan tindakan sehingga kesetaraan tidak hanya sekedar wacana yang menjadi iming-iming hidup yang berkeadilan.

E. Penutup

Saat ini perempuan hanya dituntut untuk meng-*upgrade* diri dan memperoleh kesetaraan dengan laki-laki dalam berbagai dimensi kehidupan. Manusia seakan-akan lupa dan mengenyampingkan laki-laki, baik sebagai partner perempuan ataupun sebagai sumber masalah bagi perempuan. Padahal laki-laki mempunyai peran yang sangat penting mengingat besarnya hegemoni mereka dalam kehidupan perempuan. Meningkatkan peran laki-laki dalam wacana kesetaraan gender merupakan hal yang tidak mudah, mengingat begitu besarnya nilai-nilai yang mempertahankan "kekuasaan" mereka selama ini. Konstruksi sosial, sebenarnya hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sudut pandang baru kepada laki-laki, dalam melihat diri laki-laki itu sendiri dan hubungannya dengan perempuan.

Memberikan arah baru dari konsep maskulinitas yang telah terpatritasi selama ini dalam masyarakat merupakan jalan terbaik untuk menciptakan laki-laki pro-gender. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang responsif gender; mengarahkan opini publik melalui media; membentuk kelompok-kelompok laki-laki melek gender; dan mensosialisasikan tafsir agama yang moderat kepada masyarakat. Usaha perbaikan kehidupan perempuan bukan berarti memerangi laki-laki, namun bagaimana menempatkan agar laki-laki tidak lagi menjadi subjek dan perempuan tidak lagi menjadi objek, namun keduanya setara.

F. Referensi

Adji, Muhamad. 2009. *Laporan Penelitian Buku*. Fakultas Sastra Universitas Padjajaran. Diunduh tanggal 5 Desember 2015 dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/prempuan_dalam_kuasa_patriarki.pdf.

Ali, K. H. 2000. *Menggagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan.

- Alimi, M.Y. 2004. *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*. Jakarta: LKIS.
- Aripurnami, Sita. 2013. Transformasi Gerakan dan Menguatnya Kepemimpinan Perempuan. *Afimasi Vol.02 Januari*. Jakarta: Woman Research Institut.
- Darwin, Muhadjir dan Tukiran (ed). 2001. *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: PPK UGM.
- Demartoto, Argyo. 2012. Tubuh Perempuan Dalam Konstruksi Teoritik Postmodernisme. *Sosiologi: Dilema Vol.30 No.2*. Surakarta: Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret.
- _____. 2010. *Konsep Maskulinitas Dari Jaman Ke Jaman Dan Citranya dalam Media*. Diunduh tanggal 1 Desember 2015 dari <http://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/maskulinitas-ind.pdf>.
- Departemen Agama RI. 2001. *Pelatihan Calon Pelatih (TOT) Analisis Gender*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Din. 2010. *Lelaki Perlu Mengubah Citra Dirinya*. Kompas.com (<http://female.kompas.com/read/2010/03/19/18511953/lelaki.perlu.mengubah.citra.dirinya>) diakses tanggal 4 Desember 2015.
- Emawati. 2010. Gender dan Islam. *Yinyang Vol.5 Jan-Jun*. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.
- Puspitawati, Herien. 2013. *Konsep, Teori, dan Analisis Gender*. Diunduh tanggal 1 Desember 2015 dari <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>.
- Sadli, Saparinah. 2010 *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas.

- Setiadi, E.M, & Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Sobary, Muhamad. 1998. *Diskursus Islam Sosial: Memahami Zaman Mencari Solusi*. Bandung: Zaman.
- Sumbullah. 2006. Agama dan Keadilan Gender. *EgalitaVol 1, No 1*. Malang: PSG UIN Malang.
- Valentina dan Putra. 2008. Posisi Perempuan Etnis Minangkabau dalam Dunia Patriarki di Sumatera Barat dalam Perspektif Agama, Keluarga dan Budaya. *Demokrasi Vol. 7 No.1*.Padang: Jurusan Ilmu Sosial Politik UNP.
- Woman Research Institut. 2006. *Perempuan, Demokratisasi, dan Politik Lokal di Indonesia*. (<http://wri.or.id/homepage-id/172-current-project-id/perempuan-politik/partisipasi> Perempuan/609-perempuan-demokratisasi-dan-politik-lokal-di-indonesia) diakses tanggal 2 Desember 2015.
- www.bbc.com. 2015. *Perempuan 'Kurang Terwakili' dalam Bidang Ilmu Pengetahuan* (http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/03/150306_perempuan_ilmu_eksakta) diakses tanggal 2 Desember 2015.
- Zamroni, Mohamad. 2013. Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender.*Dakwah Vol. XIV No.1*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
- Zuhrah, Fatimah. 2012. *Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*. Diunduh tanggal 3 Desember 2015 Dari <http://e.dokumen.kemenag.go.id/filles/5s2wugjf1347939303.pdf>.